



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Nomor : 95 /Kpts/Kpu-Prov-024/2015

### TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, 14, 26 dan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang Perlu untuk membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687 Tahun 1964);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU  
Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA  
Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud  
pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi masing-masing  
berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun  
2015.
- KETIGA  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 29 April 2015

  
KETUA,  
SAHRAN RADEN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Nomor : /Kpts/Kpu-Prov-024/2015  
Tanggal : 29 April 2015  
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

---

## STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

### Pembina PPID

: Sahran Raden, S.Ag., SH., MH

### Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

- : 1. DR. Nisbah, M.Si
2. Naharuddin, SH., MH
3. Samsul Y. Gafur, SH
4. Ir. Muh. Ramlan Salam, M.Si

### Atasan PPID

: Drs. H. Moh. Nur Bakti, M.Si

### PPID

: Sri Ardawati, SH

### Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Komunikasi

- : 1. Aslam Adigama, S.Sos, M.Si
2. Djufri Salingkat, SH
3. Sulasmin Sukarana, S.Sos
4. Cherly Trisna Ilyas, SH
5. Sukmawati Unok, S.Sos
6. Suhriati, S.Sos
7. Dra. Mariatin
8. Chili Cahyaningrum, SE

### Desk Pelayanan Informasi dan Komunikasi

- : 1. Welson Djaila, S.Sos
2. Moh. Kadri, SE
3. Ajeng Rahayu, S.Ksi
4. Yuli. K
5. Ajwir N. Abdul
6. Kusmawati
7. Sandy

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 29 April 2015

  
K E T U A,  
**SAHRAN RADEN**